

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT
KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

NURHANDAYANI

105710200314



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT
KESEMPATAN KERJA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

NURHANDAYANI

105710200314

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program Studi
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dengan judul **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur**, ku persembahkan kepada Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad, A. Ma dan Ibunda Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, doannya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk kerabat dan sahabat yang selalu memberikan arahan, perhatian dan motivasinya.

MOTTO HIDUP

Tujuan sosial dari kecerdikan akan mengalahkan kekuatan gelap dan kebodohan yang menyelimuti masa depan kita.

-John Maynard Keynes

(1883-1946)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Nurhandayani

No. Stambuk/NIM : 105710200314

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

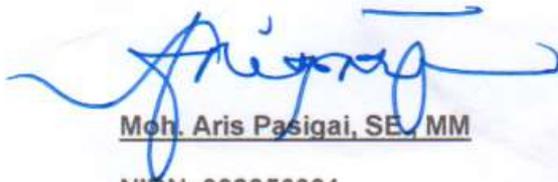
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Moh. Aris Pasigai, SE., MM

NIDN. 008056301



Warda, SE., M.Si

NIDN. 0927039003

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program Studi IESP,



Ismail Rasulong, SE., MM

NBM : 903 078



Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 710 551



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhandayani

NIM : 105710200314

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dengan Judul : “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Timur”.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 September 2018

Nurhandayani

Diketahui oleh :

Dekan,

Ketua Program Studi IESP,

Ismail Rasulong, SE., MM

Hj. Naidah, SE, M.Si

NBM. 903 078

NBN. 710 551

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dengan penuh perjuangan dan kebanggaan yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Timur”.

Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad, A. Ma dan Ibunda Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, doannya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, harapan adanya kritik dan masukan yang sifatnya membangun dari para pembaca. Di harapkan melalui hasil penelitian ini, di peroleh informasi tambahan bagi pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan masalah pendapatan daerah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan mengingat masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan, dan saran-saran sehingga skripsi ini dapat terselasaikan. Untuk itu rasa terimakasih yang sedalam-

dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para pembantu rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah SE.,M.Si selaku ketua jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Moh. Aris Pasigai, SE., MM selaku pembimbing I dan Ibu Warda, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf akademik, Staf jurusan Ilmu Ekonomi, Staf perpustakaan, pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan bantuan berupa informasi data tentang penelitian yang di butuhkan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi IESP angkatan 2014 khususnya kelas IESP yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya, dorongan dalam aktivitas studi, kenangan bersama kalian adalah salah satu kenangan paling indah.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan meberikan berkah dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Aminn

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Terima kasih

Makassar, 17 September 2018

Nurhandayani

105710200314

ABSTRAK

NURHANDAYANI, 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Moh. Aris Pasigai dan Warda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah data publikasi Badan Pusat Statistik berupa data pertumbuhan ekonomi, data tingkat kesempatan kerja, dan data tingkat kemiskinan selama tahun 2009-2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah $-0,050$ dengan tingkat signifikansi $0,600$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adapun nilai koefisien regresi variabel tingkat kesempatan kerja adalah $-0,158$ dengan tingkat signifikansi $0,029$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Kata Kunci : *Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kesempatan Kerja.*

ABSTRACT

NURHANDAYANI, 2018. The Influence of Economic Growth and the Level of Employment Opportunities Against Poverty Level in East Luwu Regency, Thesis in Economics and Development Studies Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Moh. Aris Pasigai and Warda.

This study aims to determine the effect of economic growth and the level of employment opportunities on poverty levels in East Luwu District. The type of research used in this study is research with a quantitative descriptive approach. The data processed is the Central Statistics Agency's publication data in the form of data on economic growth, employment opportunity data, and poverty level data during 2009-2017. The analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques. Based on the results of the study, it was found that the regression coefficient variable of economic growth was -0.050 with a significance level of 0.600. So it can be concluded that economic growth has a negative and insignificant effect on poverty. The value of the regression coefficient variable employment opportunity level is -0.158 with a significance level of 0.029. So it can be concluded that the level of employment opportunities has a negative and significant effect on the level of poverty in East Luwu Regency.

Keywords: *Poverty Rate, Economic Growth, Level of Job Opportunity.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. Kemiskinan.....	7
2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	9
3. Jenis-Jenis Kemiskinan	11
4. Ukuran Kemiskinan	13
5. Lingkaran Setan Kemiskinan	15
6. Penanggulangan Kemiskinan	17
7. Pertumbuhan Ekonomi	20
8. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	23
9. Kesempatan Kerja.....	26
10. Hubungan Kesempatan Kerja dan Kemiskinan.....	28

B. Tinjauan Empiris	29
C. Kerangka Konsep.....	31
D. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Pengujian Asumsi Klasik.....	36
G. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur.....	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Keadaan Klimatologi	43
3. Keadaan Demografi	45
4. Ketenaga Kerjaan	46
B. Penyajian Data Variabel Penelitian	48
1. Tingkat Kemiskinan.....	48
2. Pertumbuhan Ekonomi	50
3. Tingkat Kesempatan Kerja.....	52
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	53
1. Hasil Uji Normalitas.....	53
2. Hasil Uji Multikolinearitas	54
3. Hasil Uji Autokorelasi	55
4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
D. Hasil Pengujian Hipotesis	57
1. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	57
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	58
3. Hasil Uji Partial (Uji T).....	59
E. Pembahasan	60

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	60
2. Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1	Klasifikasi Nilai Durbin Watson Untuk Autokorelasi	38
Tabel 3.2	Kriteria Hubungan Antar variabel.....	41
Tabel 4.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017.....	48
Tabel 4.2	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017	51
Tabel 4.3	Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	56
Tabel 4.6	Hasil Uji Simultan (Uji F)	57
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
Tabel 4.8	Hasil Uji Partial (Uji T).....	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 4.1	Grafik Normal P-Plot.....	54
Gambar 4.2	Grafik Scatterplot	56

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017	68
Lampiran 2	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur 2009-2017	69
Lampiran 3	Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur 2009-2017 ..	69
Lampiran 4	Data Regresi variabel	69
Lampiran 5	Hasil Uji Simultan (Uji-F).....	70
Lampiran 6	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R square)	70
Lampiran 7	Hasil Uji Partial (Uji-t).....	70
Lampiran 8	Normal P-Plot	71
Lampiran 9	Scatterplot	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sering diasosiasikan sebagai masalah bagi negara-negara berkembang yang merupakan sebuah penyakit sosial yang lazim dialami oleh setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Kemiskinan merupakan masalah penting bagi semua yang ada di dunia, khususnya di Indonesia yang masih merupakan negara sedang berkembang (NSB). Sejak negara ini merdeka kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Masalah kemiskinan yang begitu kompleks berkaitan dengan aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi dan aspek yang lainnya. Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara harus diperhatikan sebagai masalah yang serius, karena kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat

kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu (Siregar, 2012).

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat kesempatan kerja yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan akumulasi modal yang membentuk tabungan dan investasi yang rendah, (Kuncoro, 2012). Menurut Dwi (2013) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif.

Menurut Todaro (2012) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara

lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Berbicara mengenai kemiskinan, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih menghadapi permasalahan terkait kemiskinan. Hal ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin maupun persentasenya yang belum menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa program dan kegiatan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya berdampak terhadap efektivitas penurunan angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin selama tahun 2009-2013 secara umum menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 21.000 jiwa meningkat menjadi 22.200 jiwa pada tahun 2013. Jumlah penduduk miskin masih menunjukkan pola fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin yang berfluktuasi juga diikuti oleh persentase penduduk miskin yang belum menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa program dan kegiatan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya berdampak terhadap efektivitas penurunan angka kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2012), terdapat beberap faktor yang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kemiskinan diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja, maupun akumulasi modal dalam suatu daerah. Jika dicermati, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Luwu Timur masih berfluktuasi dan belum

menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas dan pendapatan masyarakat juga belum menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja memiliki pola fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009-2013 mengalami penurunan dari 10,73 persen pada tahun 2009 menjadi 6,30 persen pada tahun 2013. Sementara tingkat kesempatan kerja juga mengalami penurunan dari 89,52 persen pada tahun 2009 menjadi 86,78 persen pada tahun 2013. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kesempatan kerja tentu saja akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan baik secara jumlah maupun persentase. Penurunan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan telah terjadi perlambatan dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan produksi menurun dan pada gilirannya akan berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap penurunan pendapatan dan peningkatan angka kemiskinan di masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, tingkat kemiskinan yang belum menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya diindikasikan memiliki keterkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja yang mengalami penurunan selama tahun 2009-2013. Oleh karena itu, dengan mengacu pada data awal yang tersedia maka penulis akan mencoba melihat hubungan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh**

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apakah tingkat kesempatan kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam melengkapi kajian tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan khususnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Chriswardani (2015) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Sedangkan menurut BPS bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/ membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit, kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravillion, 2012).

Ciri masyarakat miskin adalah : (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya/ nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang. Pengertian kemiskinan dapat didefinisikan sebagai berikut :

BKKBN mendefinisikan Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian keluarga miskin ini didefinisikan lebih lanjut menjadi : (1) paling kurang sekali sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, (3) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

Terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, tergantung dari

definisi yang digunakan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor-faktor mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain (Tambunan, 2013).

Menurut Bank Dunia (2013), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya

perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani, 2015) :

- a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.

- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

3. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Baswir (2012) dan Sumodiningrat (2012). Secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) *Kemiskinan natural*, (2) *Kemiskinan kultural*, dan (3) *Kemiskinan structural* (Kartasasmita,(2012) Sumodiningrat,(2012) dan Baswir, (2012)).

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya

alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (2012) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (2012) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (2012) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 2012). Selanjutnya

Sumodiningrat (2012) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (2012) hal ini disebut "*accidental poverty*", yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat, 2012) sebagai suatu "*lingkaran kemiskinan*" yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, di mana "*deprivation trap*" atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu: Kemiskinan, Kelemahan jasmani, Isolasi, Kerentanan, Ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi.

4. Ukuran Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan

yang dapat dipercaya menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Peng ukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (*World Bank, Introduction to Poverty Analysis, 2013*).

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain head count index (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (*distributionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (Tambunan, 2013).

Head count index (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada

dibawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (*gap*) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. *Distributionally Sensitive Index (P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

5. Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2012) sebagai berikut :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.

- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berakibat produktivitasnya juga akan rendah, upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul karena adanya akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermula pada lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) lihat Gambar 2.1. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2012) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : "Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin" (*A country is poor because it is poor*).

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut World Bank dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016) bahwa disamping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi

pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam setiap hajat hidup masyarakat perlu melakukan kajian yang mendalam dalam setiap kebijakannya agar setiap output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan pengaruh nyata terhadap masyarakat. Melalui kebijakan alokasi dana, tiap sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seharusnya perlu diberikan porsi lebih dalam alokasi anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh diantaranya yang perlu diberikan perhatian lebih, hal ini dikarenakan pada sektor-sektor tersebutlah masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil.

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa sektor – sektor tersebut dapat menjadi acuan dan gambaran dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini bukanlah pertumbuhan ekonomi secara statistik saja, namun pertumbuhan ekonomi yang juga memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama ini tidak menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah, karena pertumbuhan ekonomi yang secara statistik diungkapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan gambaran secara langsung kondisi sosial dalam

masyarakat. Sektor yang menyangkut kebutuhan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social yang masih belum memadai, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya dipacu oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2008).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (2006) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Seharusnya bentuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat makro, sektor yang dijadikan sebagai mesin pertumbuhan harus digeser dari sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga keuangan, telekomunikasi, hotel dan restoran) ke sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan). Melalui upaya semacam ini, diharapkan kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa ditekan, sehingga pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan (Agussalim, 2012).

Sedangkan pada tingkatan mikro, bentuk penanggulangan kemiskinan seharusnya dengan melaksanakan program-program pemerintah yang dapat menurunkan beban penduduk miskin dalam jangka pendek misalkan program yang meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dalam jangka waktu pendek beban biaya penduduk miskin menurun serta dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya produktivitas penduduk miskin sehingga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penduduk miskin meningkat (Agussalim, 2012).

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang

ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2012). Menurut Robinson Tarigan (2014) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Aditya, 2015). Menurut Nafziger (Aditya, 2015), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu negara.

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai

pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2012). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*. sedangkan dalam Todaro (2012) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- a. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

- c. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni : (a). Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama, (b). Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama, (c). Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

8. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Landasan teori dari beberapa penelitian memberikan kesimpulan yang beragam. Apa yang dikemukakan oleh Todaro (2012) menjadi *entry point* dalam melihat hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Menurutnya *Gross Domestic Produk/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan GNI, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menubuhkan GNI ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah

(Todaro dan Stephen C. Smith, 2012, Dawey, 2013). Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam Mankiew (2013). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ravalion (2012), Son dan Kakwani (2013) dan Bourguignon (2014) juga memberika kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiew. Menurut Ravalion (2012), Son dan Kakwani (2013) dan Bourguignon (2014) setelah mekakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat

ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim,2012).

Pendapat Bourgoignon dijelaskan lebih jauh oleh Dollar dan Kray (2012) dalam Agussalim (2012). Menurut Dollar dan Kray pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat kepada warga miskin jika pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan berbagai kebijakan seperti penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional dan strategi penanggulangan kemiskinan. Negara yang berhasil dalam pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar juga akan berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, apalagi jika terdapat dukungan kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat (Bigsten dan Levin, 2013).

Fakta pendukung peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan dijelaskan oleh Bank Dunia dalam *World Development report* (2016). Bank Dunia memberika rekomendasi kebijakan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja guna mengentaskan angka kemiskinan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dijelaskan secara teoritis melalui *virtuous circle* oleh Sagir (2015). Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi pemicu atau indikasi dunia usaha mengalami tingkat produktivitas yang tinggi dan kemudian akan berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia seiring peningkatan kapasitas produksi.

9. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang untuk bekerja yang tersedia di lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Gilarso (2014) menyatakan bahwa kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Masalah kesempatan kerja merupakan tantangan bagi generasi muda. Persoalan muncul karena pertumbuhan angkatan kerja yang cepat (karena laju pertumbuhan penduduk), yang kurang diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Mutu dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Masalah lain adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, baik sektoral maupun regional. Sementara itu, angkatan muda terdidik bertambah dengan cepatnya, jumlah wanita yang mencari pekerjaan semakin banyak dan setengah pengangguran di sektor informal semakin meluas.

Menurut Sagir (2015), perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pemerataan pembangunan yang sekaligus berfungsi untuk menciptakan ketahanan nasional serta partisipasi aktif masyarakat pada umumnya, khususnya generasi muda dan wanita dalam memikul beban, tanggung jawab serta hak untuk menikmati kembali hasil pembangunan, tidak dapat terlepas dari faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya, seperti:

- a. Kependudukan, penduduk mencerminkan kondisi dua dimensional, disatu pihak dapat merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan nasional, tetapi juga sekaligus dapat menjadi beban

nasional jikalau angka pertumbuhan tersebut tidak diimbangi oleh adanya perluasan kesempatan kerja

- b. Kedudukan Geografi dan Sumberdaya Alam, kedudukan geografi yang strategis dapat merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai wadah maupun wahana untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Kondisi Ekonomi, sektor formal dengan padat modal dengan teknologi maju serta sektor informal yang padat karya, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kemungkinan perluasan kesempatan kerja.
- d. Sosial Budaya, sosial budaya bangsa dengan pranata sosialnya merupakan nilai-nilai yang dapat mendorong atau menghambat mobilitas angkatan kerja baik secara geografis, sektoral ataupun jenis pekerjaan, untuk tercapainya perluasan angkatan kerja.
- e. Politik, politik dalam pengertian pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diambil, merupakan faktor dominan yang tidak dapat diabaikan dalam kebijaksanaan nasional untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perluasan kesempatan kerja.

Kebijakan politik yang diambil pada dasarnya harus dapat meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia yang lebih tinggi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Program-program yang disusun oleh pemerintah harus mampu meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang terpadu dalam masalah ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. Pengadaan lapangan kerja yang baru yang dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.
- b. Pola pendidikan untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja yang tersedia melalui pendidikan yang bersifat formal dan informal.
- c. Kebijakan melalui teknologi tepat untuk sektor-sektor tertentu sehingga kegiatan dalam sektor tersebut tidak saja dapat meningkat tetapi juga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.
- d. Pengarahan yang lebih nyata mengenai adanya keharusan pembaharuan antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

10. Hubungan Kesempatan Kerja dan Kemiskinan

Menurut Sagir (2015), tidak hanya dari sisi permintaan (konsumsi) dan sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi angkatan kerja, tersedianya lapangan kerja akan berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk dan selanjutnya secara otomatis akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2013), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2015), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Penelitian dari Utami (2013), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya Di Provinsi Jawa Timur”, dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis data panel. Faktor-faktor yang digunakan yaitu, kependudukan, PDRB, pendidikan, kesehatan serta pengangguran. Dari lima variabel yang digunakan, semuanya signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Variabel kependudukan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat

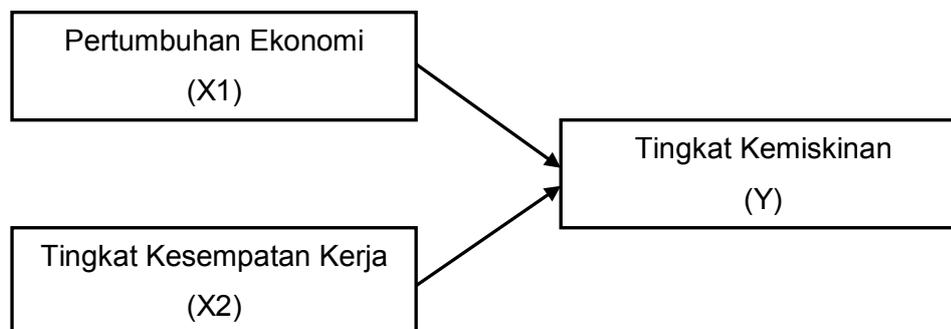
pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Dalam penelitian tersebut mendapat hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Metode Analisi	Hasil
1	Wongdesmiwati (2013) "Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan"	Pendidikan (X) dan Kemiskinan (Y).	Analisis data sekunder menggunakan <i>Ordinary Least Square</i>	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2015) "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan"	Tingkat Pendidikan (X) dan Tingkat Kemiskinan (Y).	Analisis data sekunder menggunakan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
3	Utami (2013) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur",	Jumlah Penduduk (X1), PDRB (X2), Pendidikan (X3), Kesehatan (X4), Pengangguran (X5), Kemiskinan (Y)	Analisis data sekunder menggunakan model regresi linier berganda.	Penduduk berpengaruh positif dan signifikan, PDRB berpengaruh negatif signifikan, Pendidikan berpengaruh negatif signifikan, Kesehatan berpengaruh negatif signifikan, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
4	Prasetyo (2014) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah"	Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minimum (X2), Pendidikan (X3), dan Tingkat Pengangguran (X4), Tingkat Kemiskinan (Y)	Analisis data sekunder menggunakan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

C. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dan variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Luwu Timur. Dari kerangka konsep tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudahkan kegiatan penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah negatif yang didasarkan pada pernyataan bahwa, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap tingginya penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kemiskinan di masyarakat.

Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan didasarkan pada pernyataan bahwa, semakin tinggi kesempatan kerja maka semakin besar peluang bagi angkatan kerja untuk terserap dalam pekerjaan. Dengan kata lain peningkatan kesempatan kerja akan berdampak

terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan oleh peneliti akan tetapi masih harus diuji secara empiris. Maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- a. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- b. Diduga bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis. Melalui metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti, (Saifuddin, 2012). Alasan pemilihan jenis penelitian kuantitatif karena jenis penelitian ini mampu memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap fakta yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur tepatnya di Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengumpulkan data pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja dan data tingkat kemiskinan. Alasan dipilihnya Kabupaten Luwu Timur sebagai objek penelitian dikarenakan, Kabupaten Luwu Timur memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi faktanya, kekayaan tersebut belum secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, hal ini ditandai angka kemiskinan di kabupaten Luwu Timur selama tahun 2009-2013 memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Penelitian akan dilaksanakan selama bulan September-Oktober 2018.

C. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Menurut Supomo (2012), penentuan variabel pada dasarnya adalah operasionalisasi terhadap konstruk, yaitu upaya mengurangi abstraksi konstruk sehingga dapat diukur. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Tingkat kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk miskin yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau kehidupan minimum terhadap total penduduk Kabupaten Luwu Timur menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur, diukur dalam satuan persen
- b. Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah persentase kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, diukur dalam satuan persen.
- c. Kesempatan kerja (X2) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur, diukur dalam satuan persen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dokumentasi atau publikasi informasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau sumber resmi lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Beberapa literatur teori, konsep serta studi empiris yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel diperoleh dari *text book* serta jurnal-jurnal terkait. Jenis data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* yang merupakan data entitas dengan dimensi waktu/periode yang dalam penelitian ini menggunakan periode 2009-2017.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam sumber, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari situs resmi yang diterbitkan secara resmi. Selain itu, data ini diperoleh dari beberapa hasil penelitian sebelumnya termasuk dalam karya ilmiah yang lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, dan rasio jenis kelamin terhadap pembangunan ekonomi.

Persamaan model analisis regresi linier berganda dapat dituliskan ke dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Tingkat Kesempatan Kerja

α = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = *Error Term*

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka penelitian ini menggunakan peralatan analisis dengan bantuan *software* SPSS 21. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis *regresi linear* masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

F. Pengujian Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu: Uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik.

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali (2012), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis non parametric Kolmogorof-Smirnov (K-S).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012), masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada penggunaan persamaan regresi berganda adalah *multikolinearitas*, yaitu suatu keadaan yang variabel bebasnya (independen) berkorelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Adanya *Multikolinearitas* dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10, maka terjadi problem

multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas akan menimbulkan akibat sebagai berikut :

- a. Standar error koefisien regresi yang diperoleh menjadi besar. Semakin besarnya standar error maka semakin erat kolinearitas antara variabel bebas.
- b. Standar error yang besar mengakibatkan confident interval untuk penduga parameter semakin melebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadinya kekeliruan, yakni menerima hipotesis yang salah.

3. Uji Autokolerasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya time series) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila cross sectional). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan (2012), bahwa jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Oleh karena itu, Klasifikasi nilai dw yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 3.1
Klasifikasi Nilai Durbin Watson Untuk Autokorelasi

Nilai	Keterangan
<1,10	Ada Autokorelasi
1,10 – 1,54	Tidak Ada Kesimpulan
1,55 – 2,45	Tidak Ada Autokorelasi
2,46 – 2,90	Tidak Ada Kesimpulan
>2,91	Ada Autokorelasi

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SPRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu dan data tersebut secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

G. Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama keseluruhan terhadap variabel dependen. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a

- 1) $H_0 : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 = 0$ artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a : b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 \neq 0$ artinya ada pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

b. Tes Statistik

- 1) Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama sama terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

2. Uji Partial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan atau keberartian koefisien regresi partial. Pengujian melalui uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Uji t berpengaruh positif dan signifikan apabila hasil perhitungan t hitung lebih besar dari t tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) atau probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5 % ($P < 0,05$). Selanjutnya akan dicari nilai koefisien determinasi partial (r^2) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) secara partial terhadap variabel tidak bebas (Y).

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan formulasi H_0 dan H_a

- 1) $H_0 : b_i \leq 0$ artinya H_0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
- 2) $H_a : b_i > 0$ artinya H_a ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

b. Tes Statistik

Jika $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

3. R-Square (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. Hubungan antara dua variabel penelitian memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono, 2016):

Tabel 3.2

Kriteria Hubungan Antar Variabel (Koefisien Determinasi)

Nilai R Square	Keterangan
0	Tidak ada Korelasi
>0-0,25	Korelasi Sangat Lemah
>0,25-0,50	Korelasi Cukup
>0,50-0,75	Korelasi Kuat
>0,75-0,99	Korelasi Sangat Kuat
1	Korelasi Sempurna

Sumber: Sarwono (2016)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten Luwu Timur.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.

Posisi Kabupaten Luwu Timur yang terletak antara $2^{\circ} 03' 00''$ - $3^{\circ} 03' 25''$ LS dan $119^{\circ} 28' 56''$ - $121^{\circ} 47' 27''$ BT, yang beribukota di Malili memberikan kesan geografis tersendiri karena wilayah ini yang persis berada di "pangkal kedua kaki dan paha" Pulau Sulawesi.

Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Poso-Provinsi Sulawesi Tengah di bagian Utara, Kabupaten Morowali-Provinsi Sulawesi Tengah di bagian timur, Kabupaten Konawe dan kabupaten Kolaka Utara-Provinsi Sulawesi Tenggara serta hamparan laut Teluk Bone di bagian selatan, dan kabupaten Luwu Utara-Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah barat.

Kedudukannya yang berada pada "jalur lintas" trans Sulawesi dan "wilayah perbatasan" seperti ini, sesungguhnya membawa peluang dan

tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industry dan perdagangan strategis di masa depan. Posisinya yang berada di relung pesisir Teluk Bone, dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat distribusi dan akomodasi barang dan jasa, dengan membuka aksesibilitas dan mengembangkan kerjasama fungsional dengan wilayah-wilayah sekitar, terutama dengan daerah-daerah yang memiliki bahan baku dan komoditi ekonomis karena sumber daya alam yang tersedia pada daerah dan wilayah tersebut.

Kabupaten Luwu Timur terletak antara antara $2^{\circ} 03' 00''$ - $3^{\circ} 03' 25''$ LS dan $119^{\circ} 28' 56''$ - $121^{\circ} 47' 27''$ BT. Luas wilayah seluruhnya adalah $6.944,88 \text{ km}^2$ dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 kecamatan, 99 Desa/Kelurahan. Adapun batas- batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Marowali Propinsi Sulawesi Tengah,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kendari dan Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Keadaan Klimatologi

Kedudukannya yang berada pada “jalur lintas” trans Sulawesi dan “wilayah perbatasan” seperti ini, sesungguhnya membawa peluang dan tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industry dan perdagangan

strategis di masa depan. Posisinya yang berada di relung pesisir Teluk Bone, dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat distribusi dan akomodasi barang dan jasa, dengan membuka aksesibilitas dan mengembangkan kerjasama fungsional dengan wilayah-wilayah sekitar, terutama dengan daerah-daerah yang memiliki bahan baku dan komoditi ekonomis karena sumber daya alam yang tersedia pada daerah dan wilayah tersebut.

Kesadaran terhadap ruang geografis dengan keunggulan tersebut, kemudian dapat melahirkan rancangan dan gagasan konseptual guna menjadikan daerah kabupaten Luwu Timur sebagai “motor penggerak” ekonomi regional bagi pengembangan wilayah-wilayah disekitarnya, seterusnya bisa meraih kemanfaatan kerjasama wilayah, serta mengembangkan pola ekonomi yang saling menguntungkan dan saling menghidupi (symbiose mutualism) dengan daerah-daerah lain yang berada pada satu kawasan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 10,82 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0-1.230 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Jika melihat struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah pesisir, yang kemudian disebut oleh banyak kalangan sebagai daera “tiga dimensi”. Selain dari

julukan itu, karena keunikan keberadaan 3 danau besar pada bagian timur wilayahnya, kabupaten ini juga disebut sebagai “negeri tiga danau”. Danau yang dimaksud yaitu danau Towuti (luasnya 56.670 Ha), Danau Matano (luasnya 16.350 Ha), dan Danau Mahalona (luasnya 2.348) yang cukup potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik, dan kegiatan pariwisata. Disamping itu juga terdapat 2 (dua) buah telaga, yaitu Tapareng masapi (luasnya 234 Ha), dan Lontoa (luasnya 172 Ha).

Di bidang Pemerintahan, juga masih nampak berbagai kelemahan. Sarana dan Prasarana perkantoran belum tersedia secara memadai, sumber daya manusia (SDM) aparat masih relative terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas, manajemen pemerintahan belum optimal, anggaran pemerintahan masih relatif minim, pemberian pelayanan kepada masyarakat belum maksimal, dan seterusnya. Namun kondisi ini sesungguhnya dapat dipahami mengingat bahwa kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru (terbentuk tahun 2003, pemekaran dari kabupeten Luwu Timur).

3. Keadaan Demografi

Dalam Paradigma baru, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subjek dari pembangunan. Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah social yang ditimbulkan.

Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bias menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan, demikian pula bagi Kabupaten Luwu Timur.

Penduduk merupakan aspek penting dalam berbagai indikator pembangunan karena selain sebagai subjek juga sebagai objek dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 berdasarkan estimasi hasil sensus penduduk 2000 mencapai jumlah 242.053 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 56.068 rumah tangga, Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 31.775 jiwa.

Kepadatan penduduk tahun 2009 di Luwu Timur masih kecil, hanya 35 jiwa/ km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan 272 jiwa/ km². Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 106,92 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106 laki-laki.

4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya pembangunan jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus berubah sesuai dengan keadaan demografi. Hasil survey ketenagakerjaan (Sakernas) tahun 2016 mencatat jumlah penduduk usia kerja mencapai lebih dari 144 ribu orang. Lebih dari 96 ribu orang angkatan kerja dan lebih dari 48 ribu orang bukan angkatan kerja. Dari angkatan kerja tersebut terdiri dari 64.468

laki-laki dan 32.004 perempuan. Terdapat sebanyak 85.895 orang yang bekerja dan 10.577 orang pengangguran dari jumlah angkatan kerja yang ada.

Sedangkan kategori bukan angkatan kerja berdasarkan Sakernas 2016 terdapat sekitar lebih dari 48 ribu orang. Lebih dari 12 ribu orang bersekolah. 29 ribuan orang mengurus rumah tangga, dan 6 ribuan orang kategori lainnya.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK merupakan suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2016 TPAK Kabupaten Luwu Timur sebesar 66,59 yang berarti dari 100 penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdapat 66 penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja.

Tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja sedangkan tingkat penganggur merupakan perbandingan jumlah penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja dengan angkatan kerja. Di Kabupaten Luwu Timur tingkat kesempatan kerja mencapai 89,04 persen sedangkan tingkat pengangguran mencapai 10,96 persen.

Pada tahun 2016, sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor paling dominan bagi perekonomian Luwu Timur, menyerap tenaga kerja sebanyak 59,47 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Luwu Timur. Sedangkan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah sektor industri sebesar 3,72 persen.

B. Penyajian Data Variabel Penelitian

1. Tingkat Kemiskinan (Y)

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan Penanggulangan Kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk dan rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Tabel 4.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2009	21.000	8,91
2010	22.400	9,18
2011	20.400	8,29
2012	19.900	7,72
2013	22.200	8,38
2014	20.780	7,67
2015	19.670	7,18
2016	21.080	7,52
2017	20.079	7,03

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Jika dicermati berdasarkan data publikasi BPS seperti yang disajikan dalam tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin selama tahun 2009-2017 belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 21.000 jiwa meningkat menjadi 22.400 jiwa pada tahun 2010, kemudian menurun secara konsisten sampai pada tahun 2012 menjadi 19.900 jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 22.200 jiwa, kemudian kembali menurun sampai pada tahun 2015 menjadi 19.670 jiwa, sebelum akhirnya kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 21.080 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 20.079 jiwa. Sementara persentase penduduk miskin juga memiliki pola yang sama mengikuti jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2009 persentase penduduk miskin sebesar 8,91 persen meningkat pada tahun 2010 menjadi 9,18 persen, kemudian menurun sampai pada tahun 2012 menjadi 7,72 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 8,38 persen, sebelum akhirnya kembali menurun sampai pada tahun 2015 menjadi 7,18 persen. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin kembali meningkat menjadi 7,52 persen, dan kembali menurun menjadi 7,03 persen pada tahun 2017.

Pola penurunan kemiskinan baik jumlah maupun persentase penduduk miskin yang belum menunjukkan pola penurunan yang konsisten, memberikan indikasi bahwa pola penanganan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berdampak terhadap efektivitas penurunan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan kemiskinan diakibatkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang

diterima pada tahun dimana jumlah maupun persentase penduduk miskin meningkat. Pendapatan yang rendah diakibatkan karena masih banyaknya penduduk yang belum bekerja sebagai akibat dari kesempatan kerja yang menurun. Selain itu, kebijakan yang diarahkan untuk pembangunan sektor yang dinilai banyak menyerap tenaga kerja belum cukup optimal, mengingat sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor informal, sementara sektor formal masih dominan mengandalkan pola produksi padat modal dibandingkan dengan padat karya. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja dan pada gilirannya akan berdampak terhadap rendahnya pendapatan masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

Jika dicermati berdasarkan data publikasi BPS yang disajikan dalam tabel 4.2 di bawah, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009-2017 secara umum mengalami penurunan dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sebesar 10,73 persen menurun sampai pada tahun 2011 menjadi 4,29 persen, kemudian meningkat sampai pada tahun 2014 menjadi 8,10 persen, sebelum akhirnya kembali mengalami

penurunan sampai pada tahun 2016 menjadi 1,58 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 2,07 persen.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	10,73
2010	6,62
2011	4,29
2012	5,62
2013	6,30
2014	8,10
2015	6,42
2016	1,58
2017	2,07

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun tertentu diakibatkan karena peningkatan konsumsi masyarakat yang meningkat. Kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkatkan konsumsi (pengeluaran perkapita). Adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur pada tahun-tahun tertentu sebagai akibat dari penurunan konsumsi (pengeluaran perkapita) yang diakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat. Selain itu, investasi yang masih relatif rendah juga menjadi faktor dominan dalam rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim investasi yang kondusif perlu dilaksanakan dengan memperbaiki infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, pengadaan listrik sampai ke daerah terpencil dan lain-lain. Selain itu, kemudahan dalam perizinan juga akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan para investor sehingga jumlah investasi bisa ditingkatkan dan pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Tingkat Kesempatan Kerja (X2)

Masalah kesempatan kerja tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah akan tetapi juga merupakan tantangan bagi generasi muda saat ini. Persoalan muncul karena pertumbuhan angkatan kerja yang cepat (karena laju pertumbuhan penduduk), yang kurang diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Mutu dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Masalah lain adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, baik sektoral maupun regional. Sementara itu, angkatan muda terdidik bertambah dengan cepatnya, jumlah wanita yang mencari pekerjaan semakin banyak dan setengah pengangguran di sektor informal semakin meluas.

Tabel 4.3
Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Kesempatan Kerja (%)
2009	90.064	106.213	84,80
2010	105.898	122.037	86,78
2011	103.754	111.759	92,84
2012	101.769	103.762	98,08
2013	104.930	111.957	93,72
2014	112.766	122.738	91,88
2015	123.922	130.948	94,63
2016	131.102	134.876	97,20
2017	134.795	138.367	97,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Berdasarkan data publikasi BPS yang tersaji pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa tingkat kesempatan kerja selama tahun 2009-2017 secara umum mengalami peningkatan. pada tahun 2009 tingkat kesempatan kerja sebesar 84,80 persen meningkat secara konsisten sampai pada tahun 2012 menjadi 98,08 persen, kemudian menurun

sampai pada tahun 2014 menjadi 91,88 persen, dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 menjadi 97,42 persen. Peningkatan kesempatan kerja yang belum menunjukkan peningkatan secara konsisten disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten LuwuTimur belum diimbangi oleh adanya perluasan kesempatan kerja, selain itu kondisi Ekonomi, sektor formal dengan padat modal dengan teknologi maju serta sektor informal yang padat karya, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kemungkinan perluasan kesempatan kerja.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

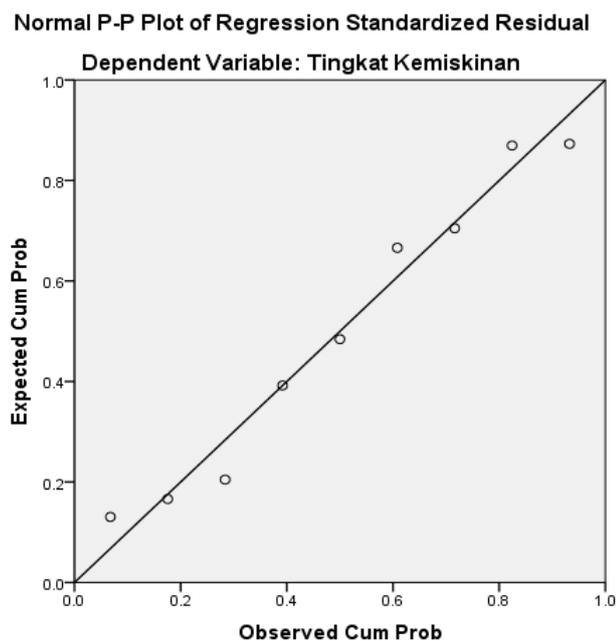
Uji analisis asumsi klasik merupakan salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yang dapat dilihat pada pengujian berikut ini:

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dengan memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan metode untuk mengetahui normal atau tidaknya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *Normal Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal

Pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya, dan mengikuti satu garis lurus diagonal jika terdistribusi

normal. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21, maka diperoleh gambar 4.1 seperti berikut ini:



Gambar 4.1

Grafik Normal P-Plot

Pada gambar 4.1 Normal *Probability Plot* di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi tingkat kemiskinan berdasarkan variabel bebasnya.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel Independen. Berdasarkan aturan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolenieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10

atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pertumbuhan Ekonomi	.408	2.449
Tingkat Kesempatan Kerja	.408	2.449

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS versi 21 seperti yang tersaji dalam tabel 4.4, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yaitu nilai VIF pertumbuhan Ekonomi adalah 2,449 , dan VIF tingkat kesempatan kerja adalah 2,449. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas antara variabel independen yakni variabel jumlah penduduk, tenaga kerja, rasio jenis kelamin, dan rasio beban tanggungan bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, dapat diabaikan karena VIF berada di antara 0,10 dengan 10.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila datanya time series) atau korelasi antara tempat berdekatan (apabila cross sectional).

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, di peroleh hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 ^a	.712	.616	.46383	1.916

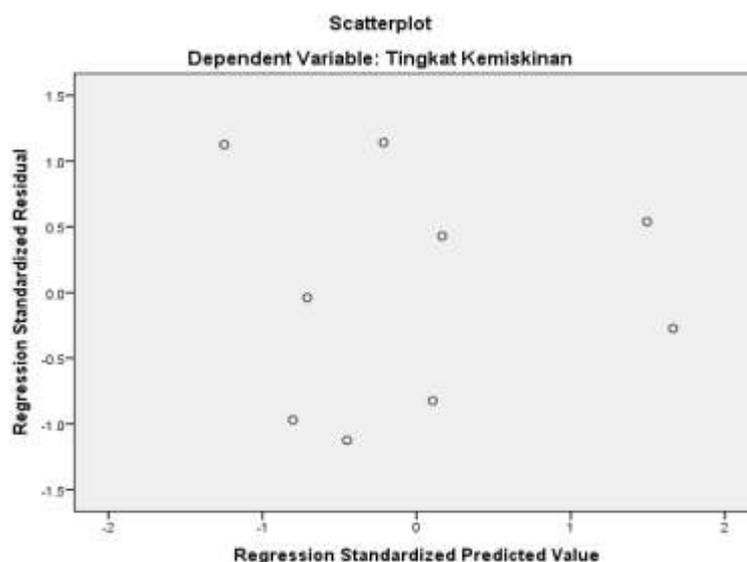
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS 21 seperti yang disajikan pada tabel 4.5, diperoleh nilai Durbin Watson (DW) 1,916. Karena nilai durbin watson berada diantara (1,55-2,45), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS 21.



Gambar 4.2

Grafik Scatterplot

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dari grafik scatter plot menunjukkan bahwa data penyebaran berada di atas nol dan di bawah nol tidak terdapat pola yang jelas, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak secara statistik. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji F, uji R square, dan uji t. Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji secara simultan atau secara bersama-sama untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.188	2	1.594	7.408	.024 ^b
Residual	1.291	6	.215		
Total	4.478	8			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 7.408 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024, dengan demikian nilai P (sig) = 0,024 < 0,05. Dengan demikian secara serentak dapat disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi (X1), dan tingkat kesempatan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y).

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R Square dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. Untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), dan tingkat kesempatan kerja (X2) terhadap variabel dependennya yaitu, tingkat kemiskinan (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 ^a	.712	.616	.46383	1.916

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,616, hal ini berarti 61% variasi perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independennya yaitu, pertumbuhan ekonomi (X1), dan tingkat kesempatan kerja (X2). Sedangkan sisanya sebesar 39% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

3. Hasil Uji Partial (Uji T)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sementara itu secara parsial pengaruh dari dua variabel independen yaitu, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri perikanan sebagai variabel dependen dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Partial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22.936	5.537		4.143	.006
Pertumbuhan Ekonomi	-.050	.090	-.190	-.554	.600
Tingkat Kesempatan Kerja	-.158	.055	-.981	-2.860	.029

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tabel 4.12 dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 22.936 - 0.050 - 0.158 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, diperoleh nilai konstanta sebesar 22,936, angka tersebut memberikan indikasi bahwa jika nilai variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan tingkat kesempatan kerja (X2) diasumsikan tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol, maka variabel tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 22,936.

Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi (X_1) sebesar $-0,050$. Koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $0,050$ persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar $0,050$ persen. Karena tingkat signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) lebih besar dari 5% ($0,600 > 0,05$), maka variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Luwu Timur.

Koefisien regresi tingkat kesempatan kerja (X_2) sebesar $-0,158$, koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara tingkat kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Setiap peningkatan kesempatan kerja sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $0,158$ persen, begitupun sebaliknya setiap penurunan tingkat kesempatan kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebesar $0,158$ persen. Karena tingkat signifikansi variabel tingkat kesempatan kerja (X_2) lebih kecil dari 5% ($0,029 < 0,05$), maka variabel tingkat kesempatan kerja (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.8, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya penurunan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap teori yang dikemukakan oleh Mankiew (2006). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Ravalion (2011), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) juga memberika kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiew. Menurut Ravalion (2011), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) setelah mekakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi,

ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim, 2009).

Faktanya pertumbuhan ekonomi belum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disebabkan karena kebijakan yang diterapkan selama ini oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya diarahkan kepada pembangunan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan penduduk juga ikut mengalami penurunan.

2. Pengaruh Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS yang disajikan dalam tabel 4.8, variabel tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan kesempatan kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya penurunan kesempatan kerja akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil perhitungan regresi tersebut telah menunjukkan konsistensi terhadap teori yang dikemukakan oleh Sagir (2005), bahwa tidak hanya dari sisi permintaan (konsumsi) dan sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam

pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja akan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi angkatan kerja, tersedianya lapangan kerja akan berdampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk dan selanjutnya secara otomatis akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Faktanya tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Luwu Timur relatif tinggi dan selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang terus memperluas kesempatan kerja melalui kebijakan politik yang didasarkan pada peningkatan produktivitas sumberdaya manusia yang lebih tinggi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Kondisi tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Program-program yang disusun oleh pemerintah harus mampu meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, kebijakan yang terpadu dalam masalah ketenagakerjaan seperti, pengadaan lapangan kerja yang baru yang dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia, pola pendidikan untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja yang tersedia melalui pendidikan yang bersifat formal dan informal, kebijakan melalui teknologi tepat guna untuk sektor-sektor tertentu sehingga kegiatan dalam sektor tersebut tidak saja dapat meningkat tetapi juga sekaligus dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,050$ dengan tingkat signifikansi $0,600$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Nilai koefisien regresi variabel tingkat kesempatan kerja sebesar $-0,158$ dengan tingkat signifikansi $0,029$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan yang memfokuskan perhatiannya pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dan pada gilirannya berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

2. Pemerintah Daerah diharapkan juga meningkatkan investasi sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja, dengan demikian kesempatan kerja di Kabupaten Luwu semakin luas dan meningkat sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya N. P, Sri 2015. *Analisis Ketimpangan antar Wilayah dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007- 2014)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Agussalim. 2012. *Penanganan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan: Pendekatan dan Agenda Kebijakan*. Makassar: Policy Paper.
- . 2012. *Mereduksi Kemiskinan; Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Baswir, Revrison. 2012. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dwi, R. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2005-2008*. Skripsi: UNDIP Semarang.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Gilarso, T. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Kanisius.
- Hasan, I. 2012. *Pokok-Pokok Materi Statistik Edisi Kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2015, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Kartasasmita, G. 2012. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kuncoro, Mudarajad. 2012. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan UPP AMP YKPN*: Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2013. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. PT.Gramedia .Pustaka Utama. Jakarta.
- Prasetyo Adit Agus, 2014. *Analisis Fktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Ravallion. 2012. *Growth, Inequality, and Poverty: Looking beyond Averages*. Policy Research Working Paper 2558. The World Bank.
- Robinson Tarigan, 2014. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sagir, S. (2015), *Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional Dan Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Bandung: LPFE.
- Saifuddin, A. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siregar, H & Wahyuniarti, D. 2012. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis, 1(1).
- Sumodiningrat, G. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Todaro, Michel P. dan Smith S.C. 2012. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T.H. 2013. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- World Bank Institute. 2013. *Intoduction to Poverty Analysis atau Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- . 2016, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.
- Wongdesmiwati, 2013. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2009	21.000	8,91
2010	22.400	9,18
2011	20.400	8,29
2012	19.900	7,72
2013	22.200	8,38
2014	20.780	7,67
2015	19.670	7,18
2016	21.080	7,52
2017	20.079	7,03

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Lampiran 2.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	10,73
2010	6,62
2011	4,29
2012	5,62
2013	6,30
2014	8,10
2015	6,42
2016	1,58
2017	2,07

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Lampiran 3.

**Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Kesempatan Kerja (%)
2009	90.064	106.213	84,80
2010	105.898	122.037	86,78
2011	103.754	111.759	92,84
2012	101.769	103.762	98,08
2013	104.930	111.957	93,72
2014	112.766	122.738	91,88
2015	123.922	130.948	94,63
2016	131.102	134.876	97,20
2017	134.795	138.367	97,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Lampiran 4.

**Data Regresi Variabel Jumlah Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat
Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009-2017**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan
2009	10.73	89.52422877	8.91
2010	6.62	89.03619703	9.18
2011	4.29	87.60017426	8.29
2012	5.62	84.79564648	7.72
2013	6.3	86.77532224	8.38
2014	8.1	92.8372659	7.67
2015	6.42	98.0792583	7.18
2016	1.58	93.72348312	7.52
2017	2.07	91.87537682	7.03

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Lampiran 5.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.188	2	1.594	7.408	.024 ^b
Residual	1.291	6	.215		
Total	4.478	8			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 ^a	.712	.616	.46383	1.916

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

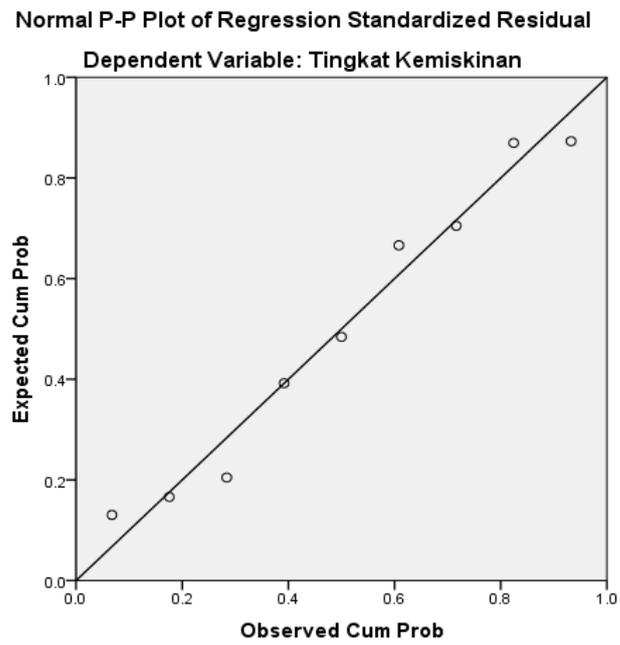
Lampiran 7.

Hasil Uji Partial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	22.936	5.537		4.143	.006
Pertumbuhan Ekonomi	-.050	.090	-.190	-.554	.600
Tingkat Kesempatan Kerja	-.158	.055	-.981	-2.860	.029

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Lampiran 8.



Lampiran 9.

